



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL (BKPM)

UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M.RUDY SALAHUDDIN RAMTO
2. Jabatan : SEKRETARIS MENTERI/SEKRETARIS UTAMA
3. NHK : 162657

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 16.085.160.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/331 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , Rp. 13.060.450.000
2. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, Rp. 12.500.000
3. Bangunan Seluas 5 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 672.210.000
4. Bangunan Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.860.000.000
5. Tanah Seluas 1.292 m2 di KAB / KOTA BONE BOLANGO, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 798.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 1974, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 50.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. MOTOR, HONDA - Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. MOTOR, HONDA - Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. MOBIL, TOYOTA DX Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000



6. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
543.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	835.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	6.507.730.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.346.780.804
F. HARTA LAINNYA	Rp.	386.160.796
Sub Total	Rp.	50.959.531.600

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 50.959.531.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.